



PEMERINTAH KABUPATEN

Jember



PERATURAN DESA

NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DESA : Curahtakir
KECAMATAN : Tempurejo
KABUPATEN : Jember
TAHUN : 2024



KEPALA DESA CURAHTAKIR

**PERATURAN DESA CURAHTAKIR
NOMOR 08 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CURAHTAKIR

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);**
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 - 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);**
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 30. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
 31. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 32. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
 33. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa;

34. Peraturan Desa Curahtakir Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025;
35. Peraturan Desa Curahtakir Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
36. Peraturan Desa Curahtakir Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun 2025.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURAHTAKIR
dan
KEPALA DESA CURAHTAKIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CURAHTAKIR TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahtakir Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.259.628.205,60
2. Belanja Desa	Rp.	3.138.831.486,29
Surplus/Defisit	Rp.	120.796.719,31
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	79.203.280,69
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	200.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(120.796.719,31)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal; (jika ada)
- c. Daftar Dana Cadangan; (jika ada)
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Curahtakir

Ditetapkan : Desa Curahtakir
Pada tanggal : 31 Desember 2024


KEPALA DESA CURAHTAKIR

BONARI UNTUNG

Diundangkan di : Desa Curahtakir
Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA CURAHTAKIR


MUKAYAH

LEMBARAN DESA CURAHTAKIR TAHUN 2024 NOMOR 8

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURAHTAKIR
DAN
KEPALA DESA CURAHTAKIR

NOMOR : 08 / BPD / XII / 2024

NOMOR : 140 / 08 / 18.2007 / 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURAHTAKIR
DAN
KEPALA DESA CURAHTAKIR

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disepakati Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa Curahtakir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
31. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah bagi Desa;

34. Peraturan Desa Curahtakir Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025;
35. Peraturan Desa Curahtakir Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
36. Peraturan Desa Curahtakir Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA CURAHTAKIR TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Curahtakir yang telah disepakati bersama menjadi Peraturan Desa Curahtakir adalah sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	3.259.628.205,60
Belanja Desa	Rp.	3.138.831.486,29
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.574.722.253,29
Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.139.851.233,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	112.125.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	87.743.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	224.390.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	3.138.831.486,29
Surplus/defisit	Rp.	120.796.719,31
Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	79.203.281,69
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	200.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(120.796.719,31)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp.	0,00

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CURAHTAKIR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran kesepakatan bersama ini.

Pasal 3

Kesepakatan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Curahtakir
pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA CURAHTAKIR



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CURAHTAKIR**



**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURAHTAKIR DAN KEPALA DESA CURAHTAKIR
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA CURAHTAKIR TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Pendopo Kantor Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, telah dilaksanakan rapat Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahtakir Tahun Anggaran 2025;

Meliputi pokok pokok pembahasan :

1. Jenis-jenis pendapatan Desa dan besaran Pendapatan
2. Jenis-jenis pembelanjaan Desa dan besaran Belanja
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Rapat musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota BPD, Kepala Desa dan unsur Perangkat Desa lainnya, unsur ormas lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa :

Pendapatan Desa	Rp.	3.259.628.205,60
Belanja Desa	Rp.	3.138.831.486,29
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.574.722.253,29
Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.139.851.233,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	112.125.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	87.743.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	224.390.000,00

Jumlah Belanja	Rp.	3.138.831.486,29
Surplus/defisit	Rp.	120.796.719,31
Pembiayaan Desa		
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	79.203.281,69
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	200.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(120.796.719,31)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp.	0,00

Demikian Berita Acara (Risalah Rapat) ini dibuat sebagai hasil kesepakatan bersama tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Curahtakir Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Curahtakir
pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA CURAHTAKIR

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


BONARI UNTUNG


ABDUR ROUF



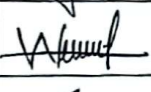
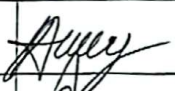
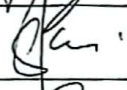
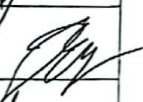
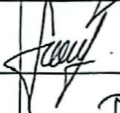
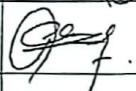
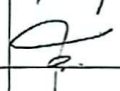
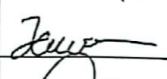
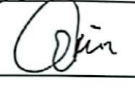
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CURAHTAKIR KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**

DAFTAR HADIR

**MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RANCANGAN APBDESA TAHUN 2025**

Hari, Tanggal : _____, _____ 2024
Jam : 08.00 WIB – Selesai
Tempat : Balai Desa Curahtakir
Jumlah peserta : Orang
Laki-laki orang, Perempuan orang

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA-TANGAN
1	Bonari Untung	L	Curahrejo	Kades	1
2	CHANDRA	L	BABINSA		2
3	agas.	L	BABINSA		3
4	ABDUR ROYF	L	Krajan 5	BPD	4
5	Father K	L	Curahrejo	BPD	5
6	A. Jaini	L	Krajan 11	BPD	6
7	SITI NURUL ANI	P	CURAH REJO	BPD	7
8	Supriati	P	Krajan 11	BPD	8
9	AGUS S.	L	Pendamping Desa	PD	9
10	Asikur M	L	Sidodadi	PLD	10
11	Eko B.	L	Sidodadi	PD	11
12	Rafida Nur Inamal	P	Krajan 1	PKK	12
13	Sumarmi	P	Curahrejo	PKK	13
14	ENDANG Y	P	Krajan 1	PKK	14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA-TANGAN
1	2	3	4	5	6
15	Intan Purnima	P.	Krajan 1	Kaur TU	
16	ABDUL WAHID A	L	Krajan 1	Kasi Pelayanan	
17	MUKAYAH	P	Curahrejo	SEKDES	
18	Mardun A.R	L	Curahrejo	KAUR. KEU.	
19	Ahmad Ghufron P	L	Krajan 1	Kasi pemb.	
20	Septhyan Surya P.	L	Kalisanten	Stap Desa	
21	Angga A.H	L	Curahrejo	BUMDES	
22	Bahrur Rofi	L	Krajan 1	Karangtaruna	
23	Dzaki Kurniawan	L	Krajan 1	Kaur PRP	
24	Bambang Herus	L	Krajan 1	Kasi Kesra	
25	Cephan	L	Krajan 1	Karangtaruna	
26	Busuro	L	Kalisanten	LPM	
27	Mat Mu'i	L	Kalisanten	KASUN	
28	GORALI	L	Krajan 1	KASUN	
29	Budi Yanto	L	PUNCO	KASUN	
30	MI. HAJI W.	L	Curahrejo	WAKASUN	
31	Poniman	L	Karangharjo	KASUN	
32	HENIK	L	KRAJAN 1	WAKASUN	

Mengetahui:
KEPALA DESACURAHTAKIR


BONARI UNTUNG

Curahtakir, 2024

KETUA BPD
DESACURAHTAKIR


ABDUR RA'UF

FOTO DOKUMENTASI



KABUPATEN:
JEMBER
KECAMATAN:
TEMPUREJO
DESA:
CURAHTAKIR

LOKASI :
Balai Desa

KEGIATAN :
Penetapan APBDes
TA. 2025



KABUPATEN:
JEMBER
KECAMATAN:
TEMPUREJO
DESA:
CURAHTAKIR

LOKASI :
Balai Desa

KEGIATAN :
Penetapan APBDes
TA. 2025



KABUPATEN:
JEMBER
KECAMATAN:
TEMPUREJO
DESA:
CURAHTAKIR

LOKASI :
Balai Desa

KEGIATAN :
Penetapan APBDes
TA. 2025



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CURAHTAKIR KECAMATAN TEMPUREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	PENDAPATAN	3.259.628.205,60	
	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	241.436.500	
	<i>Hasil Usaha Desa</i>		
	- Bagi Hasil BUMDes	10.537.000	
	- Lain-lain Hasil Usaha Desa	-	
	<i>Hasil Aset Desa</i>	230.899.500	
	- Pengelolaan Tanah Kas Desa	230.899.500	
	- Tambatan Perahu	-	
	- Pasar Desa	-	
	- Tempat Pemandian Umum	-	
	- Jaringan Irigasi Desa	-	
	- Pelelangan Ikan Milik Desa	-	
	- Hasil Kios Milik Desa	-	
	- Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga	-	
	- Lain-lain Hasil Aset Desa	-	
	<i>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</i>	-	
	- Hasil Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	-	
	- Lain-lain Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	-	
	<i>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</i>	-	
	- Hasil Pungutan Desa	-	
	- Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	
	<i>Pendapatan Transfer</i>	3.018.191.706	
	<i>Dana Desa</i>	1.652.265.000	
	Dana Desa	1.652.265.000	
	<i>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</i>	136.545.000	
	Bagi Hasil Pajak	120.845.000	
	Bagi Hasil Retribusi Daerah	15.700.000	
	<i>Alokasi Dana Desa</i>	1.229.381.706	
	Alokasi Dana Desa	1.229.381.706	
	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>	-	
	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	-	
	<i>Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota</i>	-	
	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	-	
	<i>Pendapatan Lain-lain</i>	-	
	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	-	
	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak ketiga	-	
	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	
	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	
	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun sebelumnya	-	
	Bunga Bank	-	
	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	-	
	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun berjalan	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.259.628.205,60	
	BELANJA	3.138.831.486,29	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.574.722.253,29	
	<i>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>	1.343.702.996	ADD/PAD/SILP A
	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan <i>BELANJA PEGAWAI</i>		
	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	87.000.000	ADD/PAD
	<i>Penghasilan Tetap Kepala Desa</i>	37.800.000	ADD
	1 Kepala Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 3.150.000	37.800.000	
	<i>Tunjangan Kepala Desa</i>	49.200.000	PAD
	1 Kepala Desa 1 orang x 12 Bln x Rp. 4.100.000	49.200.000	
	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	519.528.000	ADD/PAD
	<i>Penghasilan Tetap Perangkat Desa</i>	411.528.000	ADD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	1 Sekretaris Desa Non PNS : 1 Org x 12 Bln x Rp. 2.500.000	30.000.000	
	2 Kepala Urusan 3 orang : 3 Org x 12 Bln x Rp. 2.271.000	81.756.000	
	3 Kepala Seksi 3 orang : 3 org x 12 Bln x Rp. 2.271.000	81.756.000	
	4 Kepala Dusun 8 orang : 8 Org x 12 Bln x Rp. 2.271.000	218.016.000	
	Tunjangan Perangkat Desa	108.000.000	PAD
	1 Sekretaris Desa 1 orang : x 12 Bln x Rp. 1.800.000	21.600.000	
	2 Kepala Urusan 3 orang : x 12 Bln x Rp. 600.000	23.400.000	
	3 Kepala Seksi 3 orang : 3 org x 12 Bln x Rp. 600.000	23.400.000	
	4 Kepala Dusun 3 orang : x 12 Bln x Rp. 600.000	21.600.000	
	5 Kepala Dusun 1 orang : x 12 Bln x Rp. 500.000	3.600.000	
	6 Kepala Dusun 1 orang : x 12 Bln x Rp. 400.000	3.600.000	
	7 Kepala Dusun 3 orang : x 12 Bln x Rp. 300.000	10.800.000	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.693.546	ADD
	-- ASURANSI BPJS KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	5.175.706	ADD
	1 Kepala Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 120.000	1.440.000	
	2 Sekretaris Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 96.000	3.735.706	
	3 Kepala Urusan 3 orang : 3 Org x 12 Bln x Rp. 86.840		
	4 Kepala Seksi 3 orang : 2 org x 12 Bln x Rp. 86.840		
	5 Kepala Dusun 6 orang : 6 Org x 12 Bln x Rp. 86.840		
	-- ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	41.517.840	ADD
	1 Kepala Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 187.200+Rp. 90.000	3.492.720	
	2 Sekretaris Desa : 1 Org x 12 Bln x Rp. 149.760+Rp. 72.000	2.772.000	
	3 Kepala Urusan 3 orang : 3 Org x 12 Bln x Rp. 135.464+Rp. 65.128	7.554.240	
	4 Kepala Seksi 3 orang : 3 org x 12 Bln x Rp. 135.464+Rp. 65.128	7.554.240	
	4 Kepala Dusun 8 orang : 8 Org x 12 Bln x Rp. 135.464+Rp. 65.128	20.144.640	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	132.586.500,00	DD/ADD/PAD
	Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) ADD	97.450.000,00	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	97.450.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) & Benda Pos	12.000.000	ADD
	-- Belanja ATK & Bend Pos	12.000.000	ADD
	-- Belanja ATK & Bend Pos	3.799.500	ADD
	Belanja Alat Listrik/ Bateray/Lampu	2.500.000	ADD
	Belanja Alat - alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	3.000.000	ADD
	Belanja Foto Copy, Cetak, dan Penggandaan	3.400.000	ADD
	-- Foto Copy/Penggandaan	2.400.000	ADD
	-- Cetak Penjualan	1.000.000	ADD
	Belanja Makanan dan Minuman RAPAT RUTIN PEMDES	9.000.000	ADD
	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	6.500.000	ADD
	Belanja Dekorasi /Dokumentasi Pelaporan (Sarana Transparansi Publik)	6.500.000	
	Belanja Banner	5.000.000	
	Belanja Struktur Pemdes	1.500.000	
	Belanja Pakaian Dinas/atribut/dll	22.237.000	BGH R/PAD
	Penyediaan Seragam Dinas PDH Pemdes	11.700.000	BGH R
	Penyediaan Seragam/atribut Dinas RT/RW	10.537.000	PAD Bumdes
	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)	3.750.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000	
	-- Honor Ketua TPK (1 org x 5 keg x 250)	1.500.000	
	-- Honor Sekretaris TPK (1 org x 5 keg x 200)	1.250.000	
	-- Honor Anggota TPK (1 org x 5 keg x 150)	1.000.000	
	INSENTIF DAN/ATAU HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	31.200.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000	
	Belanja Honor PKPKD dan PTPKD	31.200.000	
	-- Kepala Desa (1 Orang x Rp. 500.000,00 x 12 Bulan)	6.000.000	
	-- Sekretaris Desa (1 Orang x Rp. 300.000,00 x 12 Bulan)	3.600.000	
	-- Kepala Seksi (3 Orang x Rp. 300.000,00 x 12 Bulan)	10.800.000	
	-- Kepala Urusan (3 Orang x Rp. 300.000,00 x 12 Bulan)	10.800.000	
	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000	ADD
	-- KEPALA DESA	1.200.000	
	-- SEKRETARIS DESA (1 Orang x 12 bulan x 100.000)	1.200.000	
	-- KEPALA URUSAN (3 Orang x 12 bulan x 100.000)	3.600.000	
	-- KEPALA SEKSI (3 Orang x 12 bulan x 100.000)	3.600.000	
	-- STAF DESA (2 Orang x 12 bulan x 100.000)	1.200.000	
	Belanja Listrik,Air,Telepon, Fax/Internet	15.300.000	ADD
	-- Belanja Listrik 550.000 X 12 Bulan	6.600.000	
	-- Belanja Internet Bulanan (Wifi) RP. 725.000 x 12 Bulan	8.700.000	
	Operasional Pemerintah Desa (Penyaluran BLT-DD)	9.100.000,00	DD
	-- Operasional Penyaluran BLT-DD (Masuk 3%)	9.100.000	DD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Penyediaan Tunjangan BPD	61.900.000	ADD/PAD
	Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000	ADD
	1 Ketua BPD 1 Org x 12 Bln x Rp. 600.000	7.200.000	
	2 Wakil Ketua BPD 1 Org x 12 Bln x Rp. 550.000	6.600.000	
	3 Sekretaris BPD 1 Org x 12 Bln x Rp. 550.000	6.600.000	
	4 Anggota BPD 6 orang x 12 Bln x Rp. 500.000	36.000.000	
	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kinerja BPD	5.500.000	PAD
	1 Ketua BPD 1 Org x 1 Bln x Rp. 1.000.000	1.000.000	
	2 Wakil Ketua BPD 1 Org x 1 Bln x Rp. 750.000	750.000	
	3 Sekretaris BPD 1 Org x 1 Bln x Rp. 550.000	750.000	
	4 Anggota BPD 6 orang x 1 Bln x Rp. 500.000	3.000.000	
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.600.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000	ADD
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	900.000	
	Belanja Mamin Rapat (6 X Kegiatan x Rp. 300.000)	2.700.000	
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	278.400.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	278.400.000	
	Belanja Insentif RT/RW	278.400.000	
	– Insentif RT (92 orang x 12 bulan x 200.000)	220.800.000	
	– Insentif RW (24 orang x 12 bulan x 200.000)	57.600.000	
	SUB BIDANG OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA BERSUMBER DARI DD	49.567.950	DD
	Biaya koordinasi Pemerintahan desa	15.900.000	
	Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial	7.750.000	
	Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa	25.917.950	
	Penyediaan Tambahan Penghasilan bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/LKD/Petugas Desa Lainnya	44.144.000	ADD
	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya)	37.444.000	ADD
	1 Kepala Desa : 1 Org x 1 Bln x Rp. 3.150.000	3.150.000	
	2 Sekretaris Desa Non PNS : 1 Org x 1 Bln x Rp. 2.500.000	2.500.000	
	3 Kepala Urusan 3 orang : 3 Org x 1 Bln x Rp. 2.271.000	6.813.000	
	4 Kepala Seksi 3 orang : 3 org x 1 Bln x Rp. 2.271.000	6.813.000	
	5 Kepala Dusun 8 orang : 8 Org x 1 Bln x Rp. 2.271.000	18.168.000	
	Penyediaan Tambahan Tunjangan BPD (Tunjangan Hari Raya)	4.700.000	ADD
	1 Ketua BPD 1 Org x 1 Bln x Rp. 600.000	600.000	
	2 Wakil Ketua BPD 1 Org x 1 Bln x Rp. 550.000	550.000	
	3 Sekretaris BPD 1 Org x 1 Bln x Rp. 550.000	550.000	
	4 Anggota BPD 6 orang x 1 Bln x Rp. 500.000	3.000.000	
	Penyediaan Tambahan Tunjangan STAFF DESA (Tunjangan Hari Raya)	2.000.000	ADD
	1 THR Staf Desa 2 orang : 2 Org x 1 Kali x Rp. 1.000.000	2.000.000	
	Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Makam	118.600.000	ADD
	Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Makam	37.200.000	ADD
	Belanja Honorarium Staf Desa	24.000.000	ADD
	– Staf Perangkat Desa 2 Orang x 12 x Rp. 1.000.000,-	24.000.000	
	Belanja Honorarium Petugas	13.200.000	ADD
	– Petugas Kebersihan 1 orang x 12 Bulan x Rp. 500.000	6.000.000	
	– Petugas Penjaga Kantor 2 orang x 12 Bulan x Rp. 300.000	7.200.000	
	Belanja Tunjangan Tambahan Staf dan Pembantu Kasun	59.400.000	PAD
	1 Staf Desa 2 orang : 2 Org x 12 Bln x Rp. 250.000	6.000.000	
	2 Petugas Kebersihan 1 orang : 1 Org x 12 Bln x Rp. 250.000	3.000.000	
	3 Pembantu Kasun 7 orang : 7 x 12 Bln x Rp. 600.000	50.400.000	
	Belanja Honor Operator Desa (Desa Online)	22.000.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000	
	Belanja Listrik, Air, Tyelepon, Fax/Internet	4.900.000	
	– Belanja Internet Pelayanan Adminduk (1 Orang x 12 Bulan x Rp. 100.000,00)	1.200.000	
	– Belanja Internet IDM, PPID & Website (1 Orang x 12 Bulan x Rp. 100.000,00)	100.000	
	– Belanja Internet DTKS (1 Orang x 12 Bulan x Rp. 100.000,00)	1.200.000	
	– Belanja Internet SIPADES (1 Orang x 12 Bulan x Rp. 100.000,00)	1.200.000	
	– Belanja Internet PRODESKEL, EPDESKEL, DDC (1 Orang x 12 Bulan x Rp. 100.000,00)		
	– Belanja Internet SISKEUDEK (1 Orang x 12 Bulan x Rp. 100.000,00)	1.200.000	
	Belanja Honor Operator	17.100.000	
	– Belanja Honor Operator Pelayanan Adminduk, Rudaku (1 org x 12 bln x Rp. 300.000)	3.600.000	
	– Belanja Honor Operator IDM, PPID & Website (1 org x 1 bln x Rp. 300.000)	300.000	
	– Belanja Honor Operator DTKS (1 org x 12 bln x Rp. 300.000)	3.600.000	
	– Belanja Honor Operator SIPADES (1 org x 12 bln x Rp. 300.000)	3.600.000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Belanja Honor Operator PRODESKEL, EPDESKEL, DDC (1 org x 12 bln x Rp.200.000)		
	Belanja Honor Operator SISKEUDES (1 org x 12 bln x Rp. 500.000)	6.000.000	
	JAMINAN SOSIAL BAGI BPD/STAFF/PENJAGA MALAM/PETUGAS DESA LAINNYA	1.683.000	ADD/BGHP
	ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN 2 ORANG STAF DESA	306.000	ADD
	1 Staf Kaur Perencanaan (1 Orang x Rp. 12.750 x 12 Bulan)	153.000	
	2 Staf Kaur Keuangan (1 Orang x Rp. 12.750 x 12 Bulan)	153.000	
	ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN BPD DAN ANGGOTANYA	1.377.000	ADD
	1 Ketua BPD 1 Org x 7 Bln x Rp. 12.750	153.000	
	2 Wakil Ketua BPD 1 Org x 7 Bln x Rp. 12.750	153.000	
	3 Sekretaris BPD 1 Org x 7 Bln x Rp. 12.750	153.000	
	4 Anggota BPD 6 orang x 7 Bln x Rp. 12.750	918.000	
	ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN RT/RW	-	BKK
	1 BPJS Ketenagakerjaan RT (92 Orang x Rp. 12.750 x 12 Bulan)		
	2 BPJS Ketenagakerjaan RW (24 Orang x Rp. 12.750 x 12 Bulan)		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	59.690.111,29	ADD/BGH
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.554.951,69	ADD/SILPA
	1. Belanja Pengadaan	25.554.951,69	ADD/SILPA
	-- Pengadaan Laptop (1 Unit)	13.000.000,00	ADD
	-- Pengadaan Printer	3.000.000,00	ADD
	-- Pengadaan Printer	2.403.195,00	SILPA PAD
	-- Pengadaan Alat Pengeras suara (Paket Mixer dan kabel 1 Set)	7.151.756,69	Silpa Bunga Bank
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.000.000	ADD
	-- Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.500.000	ADD
	-- Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	8.500.000	ADD
	-- Pemeliharaan Taman Kantor	4.000.000	BGH.r
	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.135.160	ADD
	-- Pembangunan Kamar mandi Kantor	18.135.160	ADD
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27.000.000	DD
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27.000.000	DD
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	22.000.000	DD
	Pemutakhiran Profil Desa berbasis Indeks Desa	22.000.000	
	Belanja Barang dan Jasa		
	-- Belanja ATK/Benda Pos		
	-- Belanja Penggandaan		
	-- Belanja Makanan dan Minuman		
	-- Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		
	-- Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut		
	-- Belanja Honor Tenaga Ahli/Narasumber		
	-- Belanja Honor Tim/Petugas Lainnya		
	-- Belanja Uang Saku Pelatihan		
	-- Belanja Uang Saku Pelatihan		
	-- Belanja Pulsa Internet		
	PEMETAAN DAN ANALISIS KEMISKINAN DESA SECARA PARTISIPATIF	5.000.000	DD
	Validasi dan Finalisasi Pendataan/Pemutakhiran Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD 2025	5.000.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	DD
	-- Belanja Barang Perlengkapan Kantor	3.350.000	
	-- UPDATING PEMETAAN KEMISKINAN DESA	1.650.000	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	109.021.646	ADD/DD
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	22.050.000	ADD
	Belanja Kegiatan Penetapan Perubahan RPJMDesa	2.250.000	ADD
	Belanja Penggandaan	150.000	
	Belanja Dekorasi Dan Dokumentasi Informasi	300.000	
	Belanja Makanan dan Minuman (50 orang x 1 Kegiatan x Rp. 30.000)	1.500.000	
	Belanja Jasa Honorarium	300.000	
	Belanja Kegiatan Penetapan APBDes Tahun 2026	3.300.000	ADD
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi Informasi	300.000	
	Belanja Makanan dan Minuman (50 orang x 1 Kegiatan x Rp. 30.000)	1.500.000	
	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000	
	Belanja Kegiatan Penetapan Perubahan APBDes	2.100.000	ADD
	Belanja Dekorasi Dan Dokumentasi Informasi	300.000	
	Belanja Makanan dan Minuman (50 orang x 1 Kegiatan x Rp. 30.000)	1.500.000	
	Belanja Jasa Honorarium	300.000	
	Belanja Kegiatan Penetapan Laporan Pertanggungjawaban	2.400.000	ADD
	Belanja Dekorasi Dan Dokumentasi Informasi	300.000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Belanja Makanan dan Minuman (50 orang x 1 Kegiatan x Rp. 30.000)	1.500.000	
	Belanja Jasa Honorarium	600.000	
	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Desa (Pembentukan Tim Penyusun RKP)	1.700.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000	
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Informasi	200.000	
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	-	
	Belanja Makanan dan Minuman (40 Org X 1 x Kegiatan x Rp. 30.000)	1.200.000	
	Belanja Honor Narasumber	300.000	
	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Desa (Perencanaan Desa)	1.700.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000	
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Informasi	200.000	
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	-	
	Belanja Makanan dan Minuman (40 Org X 1 x Kegiatan x Rp. 30.000)	1.200.000	
	Belanja Honor Narasumber	300.000	
	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdesa dan DU RKP)	6.600.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000	
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Informasi	300.000	
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	800.000	
	Belanja Makanan dan Minuman (50 Org X 1 x Kegiatan x Rp. 30.000)	1.500.000	
	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000	
	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Desa (Penetapan RKP)	2.000.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Informasi	200.000	
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	-	
	Belanja Makanan dan Minuman (40 Org X 1 x Kegiatan x Rp. 30.000)	1.500.000	
	Belanja Honor Narasumber	300.000	
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	20.050.000	ADD/DD
	KEGIATAN MUSYAWARAH DESA	6.600.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000	
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Informasi (4 x Keg x Rp. 300.000)	1.200.000	
	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih/Narasumber (2 Orang x 4 Keg x Rp. 300.000)	2.400.000	
	Belanja Makanan dan Minuman (25 Org X 4 Kegiatan x Rp. 30.000)	3.000.000	
	Kegiatan Musyawarah Penetapan KPM BLT-DD	4.200.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000	
	Belanja Makanan dan Minuman (40 Org X 2 Kegiatan x Rp. 30.000)	2.400.000	
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Informasi (2 x Keg x Rp. 300.000)	600.000	
	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih/Narasumber (3 Orang x 2 Keg x Rp. 200.000)	1.200.000	
	Kegiatan Rembuk Stunting Desa	3.250.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000	
	Belanja Makanan dan Minuman (60 Org X 1 Kegiatan x Rp. 30.000)	1.800.000	
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Informasi (1 x Keg x Rp. 250.000)	250.000	
	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih/Narasumber (6 Orang x 1 Keg x Rp. 200.000)	1.200.000	
	KEGIATAN MUSYAWARAH DUSUN (TILIK DUSUN)	6.000.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	
	Belanja Penggandaan	150.000	
	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Informasi (1 x Keg x Rp. 100.000)	100.000	
	Belanja Makanan dan Minuman (25 Org X 5 Kegiatan x Rp. 30.000)	3.750.000	
	Belanja Perjalanan Dinas/Transport	2.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000	ADD
	Penyusunan Dokumen Perubahan Perencanaan Desa (RPJMDesa)	1.650.000	ADD
	Belanja Makanan dan Minuman (50 Org X 1 x Kegiatan x Rp. 30.000)		
	Foto Copy		
	Belanja Perjalanan Dinas		
	Belanja Honorarium Tim Penyusun	1.650.000	ADD
	Kegiatan Penyusunan RKPDesa	3.350.000	ADD
	Belanja Barang Perlengkapan Kantor	200.000	
	—Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000	
	Belanja Jasa Honorarium	3.150.000	
	Belanja Jasa Honorarium Tim Penyusun RKPDes	3.150.000	
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.528.000	ADD
	Kegiatan Penyusunan APBDes Tahun 2026	1.960.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000	
	Belanja Jasa / Honor Lembur Kegiatan Penyusunan APBDES Tahun 2020	1.960.000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Belanja Honor Lembur Kegiatan Penyusunan APBDes (7 Orang x 5 Kali Keg x 2 Jam x Rp. 13.000)	910.000	
	Belanja Makanan dan Minuman (7 orang x 5 Kegiatan x Rp. 25.000)	1.050.000	
	Kegiatan Penyusunan Perubahan Perencanaan Desa (PAPBDes)	1.568.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	1.568.000	
	Kegiatan Penyusunan Perubahan APBDesa	1.568.000	
	Belanja Honor Lembur (7 Orang x 4 Kali kegiatan x 2 Jam x Rp. 13.000)	728.000	
	Belanja Makanan dan Minuman (7 orang x 4 Kegiatan x Rp. 25.000)	840.000	
	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.800.000	ADD
	Honor Pelaksana Inventarisasi Aset Desa	4.800.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000	
	-- Kepala Desa (4 Trivulan x Rp. 300.000)	1.200.000	
	-- Sekretaris Desa (4 Trivulan x Rp. 300.000)	1.200.000	
	-- Kaur Tata Usaha dan Umum (4 Trivulan x Rp. 300.000)	1.200.000	
	-- Kaur Perencanaan (4 Trivulan x Rp. 300.000)	1.200.000	
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.000.000	DD
	Belanja Modal Jaringan/Instalasi Website Desa	20.000.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.325.000	ADD
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan LPPD, LKPPD Ahir Tahun Anggaran	2.325.000	ADD
	Belanja Barang Perlengkapan	2.325.000	
	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	100.000	
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	275.000	
	Belanja Barang Konsumsi	1.200.000	
	Belanja Jasa Honorarium	750.000	
	Dukungan Pelaksanaan Tahapan Pengisian/Mutasi Perangkat Desa/staf Desa	17.568.646	ADD/SILPA ADD
	Belanja Barang dan Jasa	7.968.646	Silpa ADD
	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000	ADD
	KOORDINASI/KERJASAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH & PEMBANGUNAN DESA	13.700.000	ADD
	EVALUASI DAN PEMBINAAN KINERJA PEMERINTAH DESA	13.700.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000	
	Belanja Barang dan Jasa		ADD
	-- Belanja Mamin	4.100.000	
	-- Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000	ADD
	Sub Bidang Pertanahan	35.307.500	BGH.P/PAD
	SERTIFIKASI TANAH KAS DESA	2.800.000	BGH P
	Perjalanan Dinas 2 Orang x 8 keg x 100	1.600.000	BGH
	Biaya Administrasi Proses sertifikasi	1.200.000	BGH
	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.007.500	BGH.p
	Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah / Pajak Bumi dan Bangunan	15.007.500	BGH.p
	Belanja Barang dan Jasa	57.500	
	Cetak/Penggandaan	57.500	
	Belanja Barang Jasa Petugas lainnya	14.350.000	
	Sekretaris Desa (Koordinator)	2.100.000	
	Bendahara PBB	1.750.000	
	Oprator input	700.000	
	Petugas	9.800.000	
	Belanja Barang Jasa Petugas lainnya	600.000	
	Pulsa Operator	600.000	
	PENENTUAN/PENEGASAN BATAS/PATOK TANAH KAS DESA	12.500.000	BGH.P
	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000	BGH.P
	Pengelolaan/Pemanfaatan Tanah Kas Desa	5.000.000,00	PAD
	Honor Panitia Persewaan Tanah KAS DESA	5.000.000	PAD
	- Ketua 1 Orang x 4 Kegiatan x 250.000	1.000.000	
	- Sekretaris 1 Orang x 4 Kegiatan x 250.000	1.000.000	
	- Anggota 3 Orang x 4 Kegiatan x 250.000	3.000.000	
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.139.851.233,00	DD/BGH/ADD
	Sub Bidang Pendidikan	117.000.000	DD
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29.000.000	DD
	-- Belanja Jas Honor / Insentif Kepala PAUD 1 Org x 500 x 12 Bulan	6.000.000	DD
	-- Belanja Jas Honor / Insentif Tutor PAUD 4 Org x 300 x 12 Bulan	10.800.000	DD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	-- Belanja ATK Dll Kebutuhan Paud	12.200.000	DD
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	-	DD
	Pembangunan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa	83.500.000	DD
	1. PEMBANGUNAN GEDUNG /TAMAN BACAAN MASYARAKAT/PERPUSTAKAAN DESA	75.000.000	DD
I	Belanja Bahan	Volume	Satuan
	Pas. Papan nama proyek		
	Prasasti		
	Batu Pecah		
	Batu belah		
	Pasir Pasang		
	Tanah Timbunan		
	Cat Tembok		
	Semen		
	JUMLAH I		
III	UPAH	Volume	Satuan
	Mandor		
	Tukang		
	Pekerja		
	JUMLAH III		
	2. Kegiatan Pengadaan Sarana/Prasarana Perpustakaan	8.500.000	DD
	-- Pengadaan Buku	8.500.000	
	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MILIK DESA	4.500.000	DD
	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MILIK DESA (PENGADAAN BUKU, HONOR, TAMAN BACA)	4.500.000	DD
	1. Kegiatan Pengadaan Buku	4.500.000	DD
	-- Pengadaan Buku	4.500.000	
	2. Honor Pustakawan	-	DD
	-- Honor Pustakawan (1 Orang x 12 Bulan x @300.000,-)	-	
	Sub Bidang Kesehatan	210.600.000	ADD/DD
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	104.300.000	DD/ADD
	1. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan	16.800.000	DD
	-- PMT Penyuluhan Balita dan Ibu	16.800.000	
	2. Kelas Ibu Hamil	13.000.000	DD
	-- Belanja Kegiatan Kelas Ibu Hamil	6.500.000	
	-- Belanja Kegiatan Kelas Balita	6.500.000	
	3. Kegiatan Insentif Kader Posyandu	72.000.000	DD
	-- Belanja jasa Honor Kader Posyandu 80 org x Rp 75.000 x 12 Bulan	72.000.000	
	4. Kegiatan Posyandu Lansia	2.500.000	ADD
	-- Kegiatan Posyandu Lansia	2.500.000	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.700.000	DD
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1.450.000	DD
	-- Pelatihan Kader Kesehatan	1.450.000	
	Sosialisasi Pencegahan, percepatan penanggulangan Eliminasi TBC	2.250.000	DD
	Sosialisasi Pencegahan, percepatan penanggulangan Eliminasi TBC	2.250.000	
	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000	
	-- Belanja ATK	-	
	-- Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000	
	-- Belanja Banner	250.000	
	-- Belanja Honor Narasumber	500.000	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	16.000.000	DD
	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat	16.000.000	
	Belanja pengadaan Karpet Posyandu 16 Pos (16 Buah * 625.000)	10.000.000	
	Belanja Alat Kesehatan 12 Pos (12 Buah * 500.000)	6.000.000	
	Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	36.000.000	DD
	1. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan	36.000.000	DD
	-- PMT Pemulihan Balita	19.800.000	
	-- PMT Pemulihan Ibu Hamil KEK	8.100.000	
	-- PMT Pemulihan Buas KEK/Resti	5.400.000	
	-- PMT Pemulihan Bumil Resti	2.700.000	
	Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Stunting	44.600.000	DD
	KEGIATAN PENCEGAHAN KONVERGENSI STUNTING	44.600.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000	
	-- Bantuan Operasional & Honor KPM	6.000.000	

KODE REKENING	URAIAN				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2				3	4
	-- Operasional RDS				26.200.000	
	-- Pendataan/Pemantauan 1000 HPK				12.400.000	
	Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)				6.000.000	DD
	Kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)				6.000.000	DD
	-- Belanja barang dan jasa				6.000.000	
	SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				750.209.683	DD
	PEMELIHARAAN JALAN LAPEN Dusun Curahrejo RW.022				75.000.000	DDS
	1	Belanja Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan	
		Pas. Papan nama proyek	1,00	Ls	Rp 350.000,00	
		Prasasti	1,00	Ls	Rp 500.000,00	
		Batu Pecah	25,00	M3	Rp 312.500,00	
		JUMLAH I				
					Rp 50.000.000	
	2	UPAH	Volume	Satuan	Harga Satuan	
		Mandor	38,00	Hok	100.000	
		Tukang	188,00	Hok	90.000	
		Pekerja	454,00	Hok	75.000	
		JUMLAH IV				
					25.000.000	
	PEMELIHARAAN TPT DAN TROTOAR LAPANGAN				31.132.687	SILPA DDS
	1	Belanja Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan	
		Pas. Papan nama proyek	1,00	Ls	Rp 350.000,00	
		Prasasti	1,00	Ls	Rp 500.000,00	
		Batu Pecah	25,00	M3	Rp 312.500,00	
		JUMLAH I				
					Rp 105.000.000	
	2	SEWA ALAT	Volume	Satuan	Harga Satuan	
		Mobilisasi Alat	1,00	Ls	1.000.000	
		Sewa Alat pemadatan	5,00	Hari	750.000	
		JUMLAH II				
					Rp 1.750.000	
	3	UPAH	Volume	Satuan	Harga Satuan	
		Mandor	38,00	Hok	100.000	
		Tukang	188,00	Hok	90.000	
		Pekerja	454,00	Hok	75.000	
		JUMLAH III				
					Rp 38.250.000	
	PEMBANGUNAN JALAN LAPEN KRAJAN II				145.000.000	DDS
	1	Belanja Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan	
		Pas. Papan nama proyek	1,00	Ls	Rp 350.000,00	
		Prasasti	1,00	Ls	Rp 500.000,00	
		Batu Pecah	25,00	M3	Rp 312.500,00	
		JUMLAH I				
					Rp 105.000.000	
	2	SEWA ALAT	Volume	Satuan	Harga Satuan	
		Mobilisasi Alat	1,00	Ls	1.000.000	
		Sewa Alat pemadatan	5,00	Hari	750.000	
		JUMLAH II				
					Rp 1.750.000	
	3	UPAH	Volume	Satuan	Harga Satuan	
		Mandor	38,00	Hok	100.000	
		Tukang	188,00	Hok	90.000	
		Pekerja	454,00	Hok	75.000	
		JUMLAH III				
					Rp 38.250.000	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dusun Curahjambe RW 009) P 200 X L 1.80 Meter				63.000.000	DDS
	I	Belanja Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
		Pas. Papan nama proyek	1,00	Ls	Rp 350.000,00	
		Prasasti	1,00	Ls	Rp 500.000,00	
		Batu Pecah	25,00	M3	Rp 312.500,00	
		Batu belah	113,00	M3	Rp 231.250,00	
		Pasir Pasang	50,00	M3	Rp 181.250,00	
		Tanah Timbunan	24,00	M3	Rp 110.000,00	
		Semen	557,00	zak	Rp 60.000,00	
		JUMLAH I				
					Rp 53.948.840	
	II	UPAH	Volume	Satuan	Harga Satuan	
		Mandor	38,00	Hok	100.000	
		Tukang	188,00	Hok	90.000	
		Pekerja	454,00	Hok	75.000	
		JUMLAH II				
					Rp 29.040.000	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dusun Kallsanen RW 001) P 250 X L 1.80 Meter				61.130.000	DDS
	I	Belanja Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
		Pas. Papan nama proyek	1,00	Ls	Rp 350.000,00	
		Prasasti	1,00	Ls	Rp 500.000,00	
		Batu Pecah	25,00	M3	Rp 312.500,00	
		Batu belah	113,00	M3	Rp 231.250,00	
					-Rp 61.130.000	

KODE REKENING	URAIAN				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2				3	4
	Pasir Pasang	50,00	M3	Rp	181.250,00	
	Tanah Timbunan	24,00	M3	Rp	110.000,00	
	Semen	557,00	zak	Rp	60.000,00	
	JUMLAH I				Rp	53.948.840
	II UPAH	Volume	Satuan	Harga Satuan		
	Mandor	38,00	Hok		100.000	
	Tukang	188,00	Hok		90.000	
	Pekerja	454,00	Hok		75.000	
	JUMLAH III				Rp	28.551.160
	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dusun Curahrejo RW 023) P 150 X L 1.80 Meter				49.700.000	DDS
	I Belanja Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	
	Pas. Papan nama proyek	1,00	Ls	Rp	350.000,00	
	Prasasti	1,00	Ls	Rp	500.000,00	
	Batu Pecah	25,00	M3	Rp	312.500,00	
	Batu belah	113,00	M3	Rp	231.250,00	
	Pasir Pasang	50,00	M3	Rp	181.250,00	
	Tanah Timbunan	24,00	M3	Rp	110.000,00	
	Semen	557,00	zak	Rp	60.000,00	
	JUMLAH I				Rp	40.570.000
	II UPAH	Volume	Satuan	Harga Satuan		
	Mandor	14,00	Hok		100.000	
	Tukang	42,00	Hok		90.000	
	Pekerja	84,00	Hok		75.000	
	JUMLAH III				Rp	9.130.000
	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI				94.000.000	DDS
	1 Belanja Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan		
	Pas. Papan nama proyek	1,00	Ls	Rp	350.000,00	
	Prasasti	1,00	Ls	Rp	500.000,00	
	Batu Pecah	25,00	M3	Rp	312.500,00	
	JUMLAH I					
	2 UPAH	Volume	Satuan	Harga Satuan		
	Mandor	38,00	Hok		100.000	
	Tukang	188,00	Hok		90.000	
	Pekerja	454,00	Hok		75.000	
	JUMLAH II					
	PEMBANGUNAN JEMBATAN KRAJAN II				170.500.000	DDS
	1 Belanja Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan		
	Pas. Papan nama proyek	1,00	Ls	Rp	350.000,00	
	Prasasti	1,00	Ls	Rp	500.000,00	
	Batu Pecah	25,00	M3	Rp	312.500,00	
	JUMLAH I					
	2 UPAH	Volume	Satuan	Harga Satuan		
	Mandor	38,00	Hok		100.000	
	Tukang	188,00	Hok		90.000	
	Pekerja	454,00	Hok		75.000	
	JUMLAH II					
	REHAP PAGAR KANTOR DESA				60.746.996	BGH.p
	1 Belanja Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan		
	Pas. Papan nama proyek	1,00	Ls			
	Prasasti	1,00	Ls			
	Batu Pecah	25,00	M3			
	JUMLAH I				Rp	30.200.000
	2 UPAH	Volume	Satuan	Harga Satuan		
	Mandor	38,00	Hok			
	Tukang	188,00	Hok			
	Pekerja	454,00	Hok			
	JUMLAH IV				Rp	30.546.996
	Sub Bidang Kawasan Permukiman				60.841.550	DD
	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)-				10.584.050	DD
	Normalisasi Galian Saluran Drainase				10.584.050	DD
	1 Belanja Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan		
	Pas. Papan nama proyek	1,00	Ls	Rp	350.000,00	
	Prasasti	1,00	M3	Rp	-	
	JUMLAH I					350.000
	2 ALAT	Volume	Satuan	Harga Satuan		
	Benang	1,00	Ls	Rp	125.000,00	
	JUMLAH II					125.000
	3 UPAH	Volume	Satuan	Harga Satuan		
	Kepala Tukang	58,00	Hok		100.000	
	Pekerja	758,00	Hok		75.000	
	JUMLAH III					10.109.050
	PEMBANGUNAN FASILITAS JAMBAAN UMUM/MCK UMUM/DLL				50.257.500	BGH.p

KODE REKENING	URAIAN				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2				3	4
	PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK DESA (Lapangan)				50.257.500	BGH.p
1	Belanja Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan		
	Pas. Papan nama proyek	1,00	Ls	Rp 350.000,00		
	Prasasti	1,00	Ls	Rp 500.000,00		
	Batu Pecah	25,00	M3	Rp 312.500,00		
	JUMLAH I				Rp 40.265.500	
2	UPAH	Volume	Satuan	Harga Satuan		
	Mandor	38,00	Hok	100.000		
	Tukang	188,00	Hok	90.000		
	Pekeyja	454,00	Hok	75.000		
	JUMLAH IV				9.992.000	
	SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				1.200.000	ADD
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)				1.200.000	ADD
	Kegiatan Transparansi Informasi (APBDESA, dll)				1.200.000	
	-- Baliho LPJ (2 X 3)				300.000	
	-- Baliho APBDES, PABPDES dll (2 X 3)				900.000	
	--					
	Bidang Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan				112.125.000	ADD/DD/BGH
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				16.745.000	ADD
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes				4.245.000	ADD
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban (Linmas Desa)				4.245.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa				4.245.000	
	-- Belanja Bahan				4.245.000	
	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa				12.500.000	DD
	Penghijauan (Reboisasi Hutan)				10.000.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa				10.000.000	
	-- Belanja Bibit				10.000.000	
	Kegiatan Penanaman Bibit				2.500.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa				2.500.000	
	-- Belanja Barang dan Jasa				2.500.000	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				60.800.000	ADD/DD
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan				60.800.000	ADD/DD
	Kegiatan Peringatan Hari Hari Besar Nasional (PHBN)				30.800.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa				30.800.000	
	Honor ketua panitia HUT 1 Org x 750				700.000	
	Honor Sekretaris panitia HUT 1 Org x 650				600.000	
	Honor Bendahara panitia HUT 1 Org x 500				500.000	
	Honor Anggota panitia HUT 12 Org x 350				3.000.000	
	Belanja Konsumsi Kegiatan PHBN				7.500.000	
	Belanja ATK Kegiatan				1.400.000	
	Belanja Hadiah				6.500.000	
	Kegiatan Festival Kesenian, Kebudayaan dan Keagamaan (Dukungan HUT-RI)					DD
	Belanja Barang dan Jasa					
	Kegiatan Festival Kesenian, Kebudayaan dan Keagamaan (Pengajian dan Santunan Anak Yatim)				30.000.000	DD
	Belanja Barang dan Jasa				30.000.000	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga				2.500.000	ADD
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa				2.500.000	ADD
	Belanja Operasional Karang Taruna Desa				2.500.000	ADD
	Kegiatan Belanja Operasional Karang Taruna				2.500.000	
	Belanja Barang dan Jasa:					
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				32.080.000	ADD
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD				3.000.000	ADD
	Kegiatan Kelembagaan Masyarakat				3.000.000	ADD
	Kegiatan Belanja Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD				3.000.000	
	Belanja Barang dan Jasa:					
	Pembinaan PKK				15.000.000	ADD
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan (Operasional Tim Penggerak PKK Desa)				15.000.000	ADD
	Bidang Umum / Penguatan Kelembagaan				5.000.000	
	Belanja Barang dan Jasa:					
	Belanja Modal					

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	RETRAKSI
1	2	3	4	
		Bidang POKJA I - Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Dan Gotong Royong	2.500.000	ADD
		Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan tentang Kesadaran Hidup Bergotong royong	2.500.000	
		1. Belanja Pegawai		
		2. Belanja Barang dan Jasa:		
		Bidang POKJA II - Pendidikan dan Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi	2.500.000	ADD
		Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan dan Pembinaan tentang Pendidikan Usia Dini (PAUD)	2.500.000	
		1. Belanja Pegawai		
		2. Belanja Barang dan Jasa:		
		Bidang POKJA III - Pangan, Sandang, dan Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	2.500.000	ADD
		Kegiatan Penyuluhan tentang Penganeka ragam makanan dan Pemanfaatan Lahan Pelarangan	2.500.000	
		1. Belanja Pegawai		
		Belanja Barang dan Jasa:		
		Bidang POKJA IV - Kesehatan, Perencanaan Sehat dan kelestarian Lingkungan Hidup	2.500.000	ADD
		Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan tentang Penurunan Tingkat AKI, AKB dan AKBAL	2.500.000	
		1. Belanja Pegawai		
		Belanja Barang dan Jasa:		
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000	ADD
		Kegiatan Karang WERDA	4.000.000	ADD
		— Belanja barang dan jasa	4.000.000	
		Jamian Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	10.080.000	BGHP
		ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA (45 Orang x 12 Bulan)	10.080.000	BGHP
		1 LKD (PKK/BUMDES/LPMO/KARANGTARUNA/LINMAS) 45 Orgx12 bln	10.080.000	
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	87.743.000	ADD/DO
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	65.953.000	DD
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	65.953.000	DD
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	65.953.000	DD
		Belanja Barang dan Jasa	65.953.000	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.290.000	DD
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.750.000	DD
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.750.000	DD
		Belanja Barang dan Jasa:	4.750.000	
		Peningkatan Kapasitas BPD	2.540.000	DD
		Kegiatan Peningkatan Pengembangan Kapasitas BPD	2.540.000	DD
		Kegiatan Peningkatan Pengembangan Kapasitas BPD	2.540.000	DD
		Belanja Barang dan Jasa:		
		Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas Desa Lainnya	5.000.000	DD
		Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas Desa Lainnya	5.000.000	DD
		Kegiatan Pelatihan	5.000.000	
		SUB BIDANG Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	9.500.000	ADD
		Pelatihan/Pyenyuluhan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Produk Unggulan Desa	9.500.000	ADD
		Kegiatan Pendidikan, Pelatihan Pengelolaan Produk Unggulan Desa	9.500.000	ADD
		Kegiatan Pelatihan Produk unggulan Desa	9.500.000	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	224.390.000	DD
		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	-	DD
		Kegiatan Penanggulangan Bencana	-	DD
		Kegiatan Penanggulangan bencana	-	DD
		Penanggulangan Bencana	-	DD
		Sub Bidang Keadaan Darurat	8.390.000	DD

